



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat Jl. Pesanggerahan Sei. Dareh Jorong Sei. Kilangan, Telp/ Fak. (0754)-451426
Website: dinsos@dharmasrayakab.go.id E-mail: dinsosp3appkbdharmasraya@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas SOSP3APPKB

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE**
Jabatan : Bupati Dharmasraya

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami .

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pulau Punjung,

2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama


4 **SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE**


BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19820521 200012 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
(DINAS SOSP3APPKB)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Menurunnya masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang tertangani	80%
2	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100%
3	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	100%
		Persentase Organisasi perempuan yang aktif	96%
		Tingkat kategori capaian APE (Anugerah Parahita Ekapraya)	Pratama
4	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Pratama
		rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	100
		Rasio KDRT	0,002
5	Mengendalikan angka kelahiran total (TFR)	Angka kelahiran total	2,66
6	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi	Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR)	81,20
		Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)	10,25
7	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Persentase kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif	100
		Persentase kelompok tribina yang aktif	100
8	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (77,312)
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat	68,7
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80,5

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
(DINAS SOSP3APPKB)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Menurunnya masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang tertangani	80%
2	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100%
3	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	100%
		Persentase Organisasi perempuan yang aktif	96%
		Tingkat kategori capaian APE (Anugerah Parahita Ekapraya)	Pratama
4	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Pratama
		rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	100
		Rasio KDRT	0,002
5	Mengendalikan angka kelahiran total (TFR)	Angka kelahiran total	2,66
6	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi	Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR)	81,20
		Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)	10,25
7	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Persentase kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif	100
		Persentase kelompok tribina yang aktif	100
8	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	77,312
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat	68,7
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80,5

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
(DINAS SOSP3APPKB)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Menurunnya masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang tertangani	80%
2	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100%
3	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	100%
		Persentase Organisasi perempuan yang aktif	96%
		Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	Pratama
4	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Pratama
		rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	100
		Rasio KDRT	0,002
5	Mengendalikan angka kelahiran total (TFR)	Angka kelahiran total	2,66
6	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi	Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR)	81,20
		Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)	10,25
7	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Persentase kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif	100
		Persentase kelompok tribina yang aktif	100
8	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat	68,7
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80,5

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.979.984.560,-
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 80.004.450,-
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 106.509.000,-
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp 57.471.950,-
5	Program Penanganan Bencana	Rp 66.060.000,-
6	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 521.680.300,-
7	Program Perlindungan Perempuan	Rp 90.205.000,-
8	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 66.373.450,-
9	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 385.092.400,-
10	Program Pengendalian Penduduk	Rp 115.105.000,-
11	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 2.874.397.700
12	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 1.699.307.300
Jumlah		Rp 10.042.191.110,-

Pulau Punjung,

2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


SULTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE


BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19820521 200012 1 002